

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BENGKULU



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2024-2026

LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagrin) Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026,
2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

dengan ini Menetapkan :

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (DISPERDAGRIN)
KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026**

Dokumen Rencana Strategis DISDAGRIN Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 18 April 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BENGKULU**



Drs. BUJANG .HR, MM

Pembina Utama Muda/IV.c

Nip. 19660608 199403 1 008

A. KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Strategis tahun 2023-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu.

Berdasarkan ketentuan interuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023.

Selanjutnya Rencana Strategis disusun dengan tahapan persiapan yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Peridustrian Tahun 2024-2026 memuat Tujuan; strategi; kebijakan; program; kegiatan; sub kegiatan yang berpedoman pada RPD Koa Bengkulu Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana strategis ini memuat program sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Program lintas perangkat daerah dan program kewilayahan.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Penyempurnaan rancangan strategis perangkat daerah, bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan sistematika rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumebr Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah,

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Perumusan Pernyataan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator.

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPD

7.2 Indikator Program

VIII. PENUTUP

DAFTAR ISI

Sampul	
Lembar Penetapan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	
BAB I Pendahuluan.....	Hal. 1
1.1 Latar Belakang.....	Hal 1
1.2 Landasan Hukum.....	Hal 3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	Hal 3
1.4 Sistematika Penulisan.....	Hal 4
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	Hal 6
2.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	Hal 6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	Hal 15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	Hal 35
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.....	Hal 35
BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.....	Hal 39
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.....	Hal 40
3.2 Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga serta Renstra Perangkat Daerah Propinsi.....	Hal 41
3.3 Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.....	Hal 43
3.4 Penentuan isu-isu strategis.....	Hal 48
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	Hal 49
BAB V Strategis dan arah kebijakan.....	Hal 50
BAB VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan.....	Hal 53

BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.....	Hal 57
BAB VIII Penutup.....	Hal 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang berlaku selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut harus ditejemahkan dalam perencanaan jangka menengah masing-masing Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan periode menyesuaikan dengan RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah harus menjajarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kota Bengkulu merupakan Pusat Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Perdagangan, Pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, pariwisata serta jasa. Secara Administratif sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma, sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Kemudian Kota Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan dengan luas wilayah 539,3 KM² yang terdiri atas luas daratan 151,70 KM² dan luas lautan 387,6 KM², memiliki ekosistem lahan pantai membentang mulai dari daerah Sungai Hitam sampai daerah Padang serai, sehingga menempatkan Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah kawasan pesisir yang kaya potensi keanekaragaman hayati terkandung di dalamnya, baik secara ekologis maupun ekonomis yang dapat diolah menjadi suatu produk industri.



Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPT Daerah, dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.

Dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. **Pengelolaan Pasar** sangat strategis, potensial dan Signifikan dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu terdapat 4 Pasar yaitu : Pasar Minggu, Pasar Panorama, Pasar Baru Koto dan Pasar Pagar Dewa, serta 1 Unit Pasar Tradisional Modern (PTM). Manajemen Pengelolaan Pasar Minggu, Pasar Panorama, dan Pasar Baru Koto, pengelolaannya langsung dibawah kendali Pemda Kota Bengkulu, secara teknis dibawah pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, sedangkan Pasar Tradisional Modern (PTM) pengelolaannya oleh Perusahaan Tigadi Jo. Namun pelaksanaan kegiatan kedua

pasar ini masih tetap dibawah pembinaan dan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu.

Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pertumbuhan industri skala besar mulai bergeser pada format ekonomi kerakyatan, kemudian sebagai pusat pemerintahan, Perdagangan, Pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, pariwisata serta jasa Kota Bengkulu perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam rangka menumbuh kembangkan berbagai jenis produk baik berupa barang maupun jasa.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023,

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Rencana Strategis) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu ini adalah :

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, pasar dan Metrologi Legal,
2. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bengkulu.
3. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja) Tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dalam kurun waktu tahun 2019-2023

4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta seluruh unit kerja dan mitra kerjanya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.2 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang
- 3.4 Penentuan Isu-Isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Perumusan Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerjanya,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SU KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD
- 7.2 Indikator Program

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 , adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perdagangan dan Perindustrian,
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas;

- a. Kepala,
- b. Sekretariat,
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan,
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri,
- e. UPTD Pasar,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional,

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

C. TUGAS DAN FUNGSI

- TUGAS

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang perdagangan dan Perindustrian,

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian,
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri,
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri,
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri,
- e. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industry,
- f. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industry,
- g. Penerbitan rekomendasi perizinan Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri,
- h. Penerbitan rekomendasi perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Toko Swalayan,
- i. Surat Izin Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung,

- j. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Penyimpanan Barang dan Surat Keterangan Asal,
- k. Penerbitan rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar,
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri,
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan,
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sekretariat

- 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota,
- 2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran,
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan barang milik Negara,
 - c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji serta akuntansi,
 - d. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dinas,
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara,

- f. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan program, serta evaluasi dan pelaporan,
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 Sekretariat terdiri atas

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan ;dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, mengelola urusan kepegawaian, monitoring Perencanaan Kebutuhan barang untuk dalam 1 tahun anggaran ,Pengelolaan Aset Dinas, evaluasi dan pelaporan,
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan Perencanaan koordinasi dengan Atasan, menghimpun RKA dari bidang bidang , penelaahan, pemantauan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan administrasi keuangan, Menghimpun Penerimaan PAD, perbendaharaan gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi,dan penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, tahunan dan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengelolaan keuangan, melakukan perhitungan, penagihan penyetoran PPn/PPh, Penyetoran Penerimaan PAD, melayani pemeriksaan keuangan, menyiapkan bahan Pengoordinasian dengan unit kerja /intansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemantauan dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu.

E. Bidang Pengembangan Perdagangan

1. Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri,
2. Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan,
 - b. Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya,
 - c. Pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan,
 - d. Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan,
 - e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kota,
 - f. Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan meningkatkan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sector perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan),
 - g. Pemberian Jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota,
 - h. Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota.,
 - i. Pengoordinasian lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota,

- j. Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota,
- k. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota,
- l. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya,
- m. Pengoordinasian dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya,
- n. Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya,
- o. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya,
- p. Pengoordinasian dengan komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kota,
- q. Penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kota,
- r. Partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang,
- s. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah,
- t. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kota,
- u. Penerbitan Surat Keterangan Asal; dan Pembinaan terhadap pelaku Usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk Ekspor,
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Susunan organisasi Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Sub Substansi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri,
 - b. Sub Substansi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri,
 - c. Sub Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

F. Bidang Kemetrolagian

1. Bidang Kemetrolagian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia dan pengawasan,
2. Bidang Kemetrolagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan layanan tera dan ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya,
 - b. Pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya,
 - c. Pengelolaan cap tanda tera,
 - d. Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian,
 - e. Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kota sesuai wilayah kerjanya,

- f. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan system informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian,
 - g. Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian,
 - h. Pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, BDKT, satuan ukuran,
 - i. Pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian,
 - j. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal,
 - k. Fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur,
 - l. Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal,
 - m. Penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian,
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Susunan organisasi Kepala Bidang Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang Kemetrolagian dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang,
 3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Substansi Pelayanan Tera dan Tera Ulang,
 - b. Sub Substansi Bina Sumber Daya Manusia,
 - c. Sub Substansi Pengawasan.
- G. Bidang Sarana dan Prasaran Industri, dan Peberdayaan Industri
1. Bidang Sarana Prasaran Industri dan Pemberdayaan Industri bertugas penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

daerah pembinaan pada Sarana Prasaran Industri dan Pemberdayaan Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

2. Bidang Sarana Prasaran Industri dan Pemberdayaan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kota,
 - b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota,
 - c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kota,
 - d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota,
 - e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kota,
 - f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pemberian perizinan bidang Industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi, administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Susunan organisasi Kepala Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.,
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Sub Substansi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah,
 - b. Sub Substansi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri,
 - c. Sub Substansi Pengelolaan Data dan Informasi industri,

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut ini akan dijelaskan sumber daya ada pada Perangkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu berjumlah 87 Orang yang semuanya ASN dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, berikut ini data ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu diklasifikasikan berdasarkan Golongan sebagai mana tabel 2.1 dan tingkat pendidikan sebagai mana tabel 2.2, sebagai berikut :

Tabel 2.1

ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Berdasarkan Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Juru Muda	I/a			0
2	Juru Muda Tingkat I	I/b			0

3	Juru	I/c	1		1
4	Juru Tingkat I	I/d	1		1
5	Pengatur Muda	II/a			0
6	Pengatur Muda Tingkat I	II/b			
7	Pengatur	II/c	5	3	8
8	Pengatur Tingkat I	II/d	9	3	12
9	Penata Muda	III/a	1	2	3
10	Penata Muda Tk. I	III/b	9	6	15
11	Penata	III/c	4	6	10
12	Penata Tk. I	III/d	6	14	20
13	Pembina	IV/a	4	3	7
14	Pembina Tk. I	IV/b			
15	Pembina Utama Muda	IV/c	1		1
16	Pembina Utama Madya	IV/d			0
17	Pembina Utama	IV/e			0
JUMLAH			41	37	78

Tabel 2.2

ASN Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	SD/SR	1	0	1
2	SLTP/ ST	1	0	1
3	SLTA/ MAN/ SMK	15	7	22
4	D I	0	0	0
5	D II	0	0	0

6	D III	2	1	3
7	D IV	0	0	0
8	S 1	17	25	43
9	S 2	5	3	8
10	S 3	0	0	0

2. Sumber Daya Ekonomi

Kota Bengkulu terdapat beberapa Pasar Tradisional antara lain :

1. Pasar Minggu,
2. Pasar Baru Koto,
3. Pasar Panorama,
4. Pasar Jangkar Mas, dan
5. UPTD Metrologi.

3. Sarana dan Prasarana

Adapun aset / sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindsurian dan Perdagangan Kota Bengkulu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, sebagai berikut :

Tabel, 3.1

NO	JENIS	LUAS M ²	TAHUN	LOKASI	FUNGSI	KET
1	Tanah Bangunan Pasar	12,29 6	2008	Jl.Tapak Padri Pasar Barukoto Bengkulu	Gedung Pasar BK.I	Tanah Bangunan Gedung Pasar Barukoto I
2	Tanah Bangunan Pasar	11,50 4	2008	jl.Tapak Padri Pasar barukoto Bengkulu	Gedung Pasar BK.II	Tanah bangunan gedung Pasar Barukoto II
3	Tanah Bangunan Pasar	15,66 2	2008	Jl.Basuki Rahmat Kota Bengkulu	Gedung Pasar	Tanah Bangunan Gedung Pasar Minggu Sembako

4	Tanah Bangunan Pasar	31,00 0	2008	Jl.salak Pasar Panorama Kota Bengkulu	Bangun an Pasar	Tanah bangunan gedung Pasar Panorama Kota Bengkulu
5	Tanah Bangunan Pasar	20,00 0	2008	Jl.Syamsul Bahrun RT.3 kel.Bentiring Kota Bengkulu	Bangun an Pasar	Tanah Bangunan Gedung Pasar Bentiring Kota Bengkulu
6	Tanah Bangunan Pasar	13,00 0	2008	Jl.Raden Patah No.1 Pagar Dewa Kota Bengkulu	Bangun an Pasar pagar dewa	Penilaian Aset 2014
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	867	2008	Jl.Hibrida XV Sidomulyo Kota Bengkulu	Kantor	Tanah bangunan kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu

Selain prasarana tanah bangunan kantor diatas, prasarana lain, yaitu :

Tabel 3.2

NO	Jenis / Nama Barang	Merk/ Type	Lokasi
1	AC Split	Mitsubishi / tempel dinding	Sekretariat
2	AC Split	lokal	Ruang Kepala Dinas
3	AC Unit	Panasonic / tempel	Bidang Bina Usaha Perdagangan
4	AC Unit	LG / dinding	Bidang Pasar
5	AC Unit	Sharp / Plasma Cluster	Ruang Kepala Dinas
6	AC Unit	Sharp / Plasma Cluster	Keuangan
7	AC Unit	Sharp 9 MEY	AC 2 (dua) unit 1 PK
8	AC Unit	AC Sharf1/2 PK Tipe AH A 5 SEY	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin
9	Alat Penghancur Kertas	Smart Shader SM-6161	Alat Penghancur Kertas

10	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	TERA-TERA ULANG UTTP	PERALATAN PENGAWAS DAN TERA/TERA ULANG UTTP. Gudang 1
11	Amplifiler	tens	Ruang Penjaga
12	Band Kas	ichiban	Keuangan
13	Buffet Kayu	lokal	Ruang Kepala Dinas
14	Camera Digital	Nikon / Cool PIX L 840	Camera Digital
15	Camera Electronic	Canon	Rusak Berat
16	Clearing Instalation	INSTALASI CCTV	INSTALASI SETING JCK LISTRIK PENGADAAN CCTV TA 2014. UPTD Ps. Panorama
17	Clearing Instalation	INSTALASI CCTV	INSTALASI SETING JCK LISTRIK PENGADAAN CCTV TA 2014. UPTD Ps.Panorama
18	Clearing Instalation	INSTALASI CCTV	INSTALASI SETING JCK LISTRIK PENGADAAN CCTV TA 2014.UPTD Ps.Panorama
19	Clearing Instalation	INSTALASI CCTV	INSTALASI SETING JCK LISTRIK PENGADAAN CCTV TA 2014. UPTD Ps.Panorama
20	Clearing Instalation	INSTALASI CCTV	INSTALASI SETING JCK LISTRIK PENGADAAN CCTV TA 2014.UPTD Ps.Panorama
21	Clearing Instalation	INSTALASI CCTV	INSTALASI SETING JCK LISTRIK PENGADAAN CCTV TA 2014. UPTD Ps.Panorama
22	Corong Mix	TOA / ZH 5025	PENGADAAN CCTV TA 2014, UPTD Ps.Panorama
23	Dispenser	lokal	Bidang Pasar
24	Dispenser	national	Sekretariat
25	Dispenser	kirin / duduk	UPTD Pasar Minggu
26	Dispenser	kirin	UPTD Ps.Panorama
27	Dispenser	lokal	Bidang Usaha Perdagangan
28	Dispenser	lokal	Keuangan
29	Dispenser	kirin	Bidang Perlindungan Konsumen
30	Filling Besi/Metal	lion / 4 tingkat	Bidang Bina Usaha Perdagangan
31	Filling Besi/Metal	yunika / 4 tingkat	Ruang Tamu
32	Filling Besi/Metal	yunika / 4 tingkat	Sekretariat

33	Filling Besi/Metal	Yunika / 4 tingkat	Bidang Pasar
34	Filling Besi/Metal	yunika / 4 tingkat	Ruang Tamu
35	Filling Besi/Metal	Yunika / 4 tingkat	Rusak Berat
36	Filling Besi/Metal	yunika / 4 tingkat	Rusak Berat
37	Filling Kayu	lokal / rak	UPTD Ps.Barukoto
38	Filling Kayu	lokal / 6 tingkat	UPTD Ps.Barukoto
39	Filling Kayu	lokal / 6 rak	UPTD Ps.Barukoto
40	Filling Kayu	lokal	Bidang Pasar
41	Filling Kayu	lokal / 6 tingkat	UPTD Ps.Barukoto
42	Filling Kayu	lokal	UPTD Ps. Minggu
43	Gambar Presiden/Wakil Presiden	lokal	Ruang Kepala Dinas
44	Gambar Presiden/Wakil Presiden	lokal	Rusak Berat
45	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Lokal	UPTD Ps.Barukoto
46	Generator Electric	krisbow	Gudang 1
47	Gordeng	vertikal blind code 1836	pembayaran pembelian gordyn
48	Handy Talky	alimko	UPTD Pasar Minggu
49	Hard Disk	SEAGATE / SATA	HDD AV PENGADAAN CCTV. UPTD Ps.Panorama
50	Jam Mekanis	lokal / jam dinding	Keuangan -Rusak berat
51	Jam Mekanis	lokal / dinding	Sekretariat
52	Jam Mekanis	lokal / dinding	
53	Jam Mekanis	lokal / dinding	Rusak Berat
54	Jam Mekanis	lokal / dinding	Bidang Bina Usaha Perdagangan
55	Jam Mekanis	lokal / jam dinding	Ruang Tamu
56	Jam Mekanis	lokal / dinding	Ruang Kepala Dinas
57	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	INDUSTRI AFTA KAROSERI	Perlindungan Konsumen
58	Kipas Angin	maspion / dinding	Bidang Bina Usaha Perdagangan
59	Kipas Angin	cmc / gantung	Bidang Perlindungan Konsumen
60	Kipas Angin	lokal	Bidang Industri A
61	Kipas Angin	CMC / gantung	Sekretariat
62	Kipas Angin	CMC / gantung	Bidang Industri A
63	Kipas Angin	CMC / gantung	Sekretariat

64	Kipas Angin	maspion / dinding	Bidang Pasar
65	Kipas Angin	kirin / dinding	Bidang Perlindungan Konsumen
66	Kipas Angin	cmc / gantung	Rusak Berat
67	Kipas Angin	CMC / gantung	Rusak Berat
68	Kipas Angin	lokal	Bidang Pasar
69	Kipas Angin	Lokal	Rusak Berat
70	Kursi Besi/Metal	kursi Futura / kursi besi/metal	Dari DPPKA
71	Kursi Biasa	Futura	Mutasi Tambah DPKA
72	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	lokal	Bidang Industri B
73	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Pasar Minggu
74	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Pasar Minggu
75	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Panorama
76	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Panorama
77	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / putar	Bidang Industri A
78	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / putar	UPTD Ps.Panorama
79	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / putar	Bidang Industri A
80	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	lokal / putar	Bidang Industri A
81	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	chitose / lipat	Sekretariat
82	Kursi Kerja Pegawai Non Strukturi	lokal / hadap	UPTD Ps.Panorama
83	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	lokal / hadap	UPTD Ps.Panorama

84	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	lokal / hadap	Bidang Industri A
85	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	lokal / putar	Sekretariat
86	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	chitose / lipat	Sekretariat
87	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	chitose / lipat	Bidang Perlindungan Konsumen
88	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / hadap	Bidang Industri A
89	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / putar	UPTD Ps.Barukoto
90	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Bina Usaha Perdagangan
91	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / putar	UPTD Ps.Barukoto
92	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / biro	Bina Usaha Perdagangan
93	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / putar	Sekretariat
94	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / hadap	Bina Usaha Perdagangan
95	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / putar	Bidang Industri B
96	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / hadap	Bidang Pasar
97	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	indachi / putar	Bidang Bina Usaha Perdagangan
98	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / putar	Bidang Industri B
99	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	napoli top	Bidang Industri A
100	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / panjang	UPTD Ps.Barukoto

101	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Barukoto
102	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Barukoto
103	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / tangan	Bidang Pasar
104	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Pasar
105	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Bidang Bina Usaha Perdagangan
106	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / hadap	Bidang Bina Usaha Perdagangan
107	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / putar	UPTD Ps.Barukoto
108	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Barukoto
109	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Barukoto
110	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Barukoto
111	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Bidang Perlindungan Konsumen
112	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Barukoto
113	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Bidang Industri B
114	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / hadap	Bidang Bina Usaha Perdagangan
115	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / lipat	Bidang Bina Usaha Perdagangan
116	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Bidang Bina Usaha Perdagangan
117	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Bidang Bina Usaha Perdagangan
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	GC / 207	PENGADAAN CCTV TA 2014
119	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	fireti / Kursi Pimpinan	Mutasi Tambah Dari DPPKA

120	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	lokal / 1 laci	UPTD Ps.Barukoto
121	Kursi Lipat	chitose	Bidang Perlindungan Konsumen
122	Kursi Lipat	big star	Bidang Pasar
123	Kursi Lipat	chitose	Bidang Industri B
124	Kursi Lipat	chitose	Bidang Industri B
125	Kursi Lipat	chitose	Bidang Industri B
126	Kursi Plastik	napoly top	Sekretariat
127	Kursi Plastik	G-101 / Hadap	Ruang Tamu
128	Kursi Plastik	napoly top	Sekretariat
129	Kursi Plastik	NAPOLY / PLASTIK	PENGADAAN CCTV TA 2014. Gudang 1
130	Kursi Plastik	NAPOLY / PLASTIK	PENGADAAN CCTV TA 2014.Gudang 1
131	Kursi Plastik	NAPOLY / PLASTIK	PENGADAAN CCTV TA 2014. Gudang 1
132	Kursi Putar	Chitose / putar	Bidang Industri B
133	Kursi Putar	lokal	Bidang Industri B
134	Kursi Putar	lokal	Sekretariat
135	Kursi Putar	lokal	Bidang Usaha Perdagangan
136	Kursi Putar	lokal / putar	Bidang Bina Usaha Perdagangan
137	Kursi Putar	kursi Putar subaru / subaru SB 105 Oscar Hitam	Dari DPPKA
138	Kursi Rapat	Chitose	Ruang Kepala Dinas
139	Kursi Tamu	Lokal / Sofa	UPTD Ps.Barukoto
140	Kursi Tamu	lokal	Ruang Kepala Dinas
141	Kursi Tamu	stailis	
142	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Kursi Tamu Sofa 321 Horizon / Sofa 321 Horizon	Belanja Modal Pembayaran Pembelian Kursi Tamu
143	Lambang Garuda Pancasila	lokal	Ruang Kepala Dinas
144	Lap Top	Toshiba	Bidang Pasar
145	Lap Top	Accer	Gudang
146	Lap Top	thosiba / pentium	Rusak Berat
147	Lap Top	Lokal	Rusak Berat
148	Lap Top	Dell / N 4050	Sekretariat (Lilis Suriani, SE)
149	Lap Top	Assus	Keuangan (Lilis Suriani, SE)

150	Lap Top	Assus	Sekretariat
151	Lap Top	Assus	Bidang Perlindungan Konsumen (Drs. Hartama)
152	Lap Top	HP 1000 / LED	Keuangan (Putri Handayani, SE)
153	Lap Top	HP 1000 / LED	Keuangan (Fetry Novalina)
154	Lap Top	Acer / E 5-473	Laptop Accer 2 (dua) unit
155	Lap Top	Accer / Aspire E14	laptop Aceer
156	Lap Top	Assus / X4414A-I3	belanja modal Pembayaran Laptop kegiatan pengawasan Stok Barang Pokok dan Barang Penting
157	Lap Top	Assus / CORR i 7	Pengadaan Lap Top
158	Laser Disc	lokal	Rusak Berat
159	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 3 pintu	UPTD Pasar Minggu
160	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal	Rusak Berat
161	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 2 pintu	Rusak Berat
162	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 2 pintu	UPTD Ps.Barukoto
163	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 3 pintu	UPTD Ps.Barukoto
164	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 2 pintu	Rusak Berat
165	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 2 pintu	Keuangan
166	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 2 pintu	Keuangan
167	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 2 pintu	Bidang Pasar
168	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	lokal / 2 pintu	Rusak Berat
169	Lemari Es	sharp / 2 pintu	Ruang Kepala Dinas

170	Lemari Kaca	lokal	Bidang Perdagangan
171	Lemari Kaca	lokal	Bidang Industri A
172	Lemari kayu	lokal / 2 pintu	UPTD Pasar Minggu
173	Lemari kayu	lokal / 1 pintu	UPTD Pasar Minggu
174	Lemari kayu	lokal / 2 pintu	Bina Usaha Perdagangan
175	Lemari kayu	lokal / 2 pintu	Bidang Perlindungan Konsumen
176	Lemari kayu	lokal / 2 pintu	Rusak Berat
177	Lemari Kayu	lokal	Rusak Berat
178	Lemari Kayu	lokal	Ruang tamu
179	Lemari Kayu	lokal	Ruang Tamu
180	Lemari kayu	lokal / 2 pintu	Ruang Tamu
181	Lemari kayu	lokal / 2 pintu	Sekretariat
182	Lemari kayu	lokal / 2 pintu	Bidang Pasar
183	Lemari Kayu	lokal / 2 pintu	UPTD Ps.Barukoto
184	Lemari Kayu	LOKAL	Rusak Berat
185	Loudspeaker	TOA	UPTD Ps.Panorama
186	Loudspeaker	ion	Rusak Berat
187	Meja Biro	Expo MT 3001 / Meja 1/2 Biro	Dari DPPKA
188	Meja Biro	Meja biro expo MP 160 / meja biro expo MP 160	Dari DPPKA
189	Meja Biro	meja lokal 1/2 biro / meja biro	Mutasi Tambah Dari DPPKA
190	Meja Biro	UNO	Mutasi tambah dari BPKAD
191	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / Biro	UPTD Pasar Minggu
192	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	UPTD Pasar Minggu
193	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Pasar Minggu
194	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	UPTD Pasar Minggu
195	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Pasar Minggu
196	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	UPTD Pasar Minggu

197	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	UPTD Pasar Minggu
198	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	UPTD Pasar Minggu
199	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Keuangan
200	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	Keuangan
201	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	UPTD Pasar Minggu
202	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 Biro	UPTD Pasar Minggu
203	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / biro	UPTD Pasar Minggu
204	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Sekretariat
205	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / Biro	UPTD Ps.Panorama
206	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	UPTD Ps.Panorama
207	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	UPTD Ps.Panorama
208	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / biro	UPTD Ps.Panorama
209	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	UPTD Ps.Panorama
210	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 Biro	Binusdag
211	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Industri A

212	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	UPTD Ps.Panorama
213	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Binusdag
214	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	UPTD Ps.Barukoto
215	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	UPTD Ps.Barukoto
216	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Pasar
217	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Ruang Tamu
218	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Binusdag
219	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / Biro	UPTD Ps.Barukoto
220	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	Bidang Pasar
221	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Pasar
222	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	olimpic / 1 laci	UPTD Ps.Barukoto
223	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	olympic / 2 laci	UPTD Ps.Barukoto
224	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Pasar
225	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Industri B
226	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Pasar

227	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	UPTD Ps.Barukoto
228	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Bidang Industri B
229	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	Bidang Perlindungan Konsumen
230	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	solid / 1/2 biro	Bidang Perlindungan Konsumen
231	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	olympic / 1 laci	Bidang Perlindungan Konsumen
232	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Perlindungan Konsumen
233	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Bidang Industri B
234	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	Bidang Industri A
235	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1 laci	Sekretariat
236	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 2 laci	Sekretariat
237	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Sekretariat
238	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Sekretariat
239	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal / 1/2 biro	Sekretariat
240	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	lokal	Bidang Perlindungan Konsumen
241	Meja Kerja Pejabat Eselon II	lokal / biro	Ruang Kepala Dinas
242	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / Biro	UPTD Pasar Minggu

243	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / 1/2 biro	Sekretariat
244	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / 1/2 biro	UPTD Ps.Barukoto
245	Meja Kerja Pejabat Eselon III	lokal / biro	Sekretariat
246	Meja Kerja Pejabat Eselon III	lokal / 2 laci / biro	Binusdag
247	Meja Kerja Pejabat Eselon III	lokal	Bidang Industri A
248	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	lokal / 1/2 biro	Sekretariat
249	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	lokal	UPTD Ps.Panorama
250	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	lokal / 1/2 biro	UPTD Pasar Minggu
251	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	lokal / 1/2 biro	UPTD Ps.Panorama
252	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	lokal / 1/2 biro	Bidang Perlindungan Konsumen
253	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	lokal / 1/2 biro	Bidang Industri A
254	Meja Komputer	Lokal	Bidang Industri B
255	Meja Komputer	lokal	Bidang Perlindungan Konsumen
256	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Lokal / bundar	Bidang Pasar
257	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	lokal	Ruang Kepala Dinas
258	Meja Telpn	lokal	Bidang Industri A
259	Mesin Absensi	-	Mesin Finger Print Mutasi dari BPKA seharga 4,402,400 + 1.202.000 biaya pemasangan
260	Mesin Absensi	Mugen	Mutasi dari BPKA Kota Finger Print ke masing-masing UPTD Dinas Perindag
261	Mesin Ketik Listrik Portable	lokal	Rusak berat

262	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	ollivetti / 18 "	UPTD Ps.Barukoto
263	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Olympia	UPTD Ps.Barukoto
264	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Olympia	Rusak Berat
265	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Olympia	Sekretariat
266	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	lokal	UPTD Barukoto
267	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	lokal	UPTD Ps.Barukoto
268	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	royal	UPTD Ps.Minggu
269	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	royal	UPTD Ps.Barukoto
270	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	royal	UPTD Ps.Panorama
271	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	royal	Rusak Berat
272	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	royal	UPTD Ps.Barukoto
273	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	ollivetti	UPTD Ps.Barukoto
274	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	expres	Gudang Barukoto
275	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Brother	Bidang Pasar
276	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Brother	Gudang Barukoto

277	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Mitsubishi / kuda glx	Rusak Berat - Kendaraan Kepala Dinas- Di Kembalikan Ke BPKAD Kota Bengkulu
278	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / HILUX	Bidang Pasar (Kabid)
279	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA AVANZA / AVANZA NEW 1.3G M/T	MUTASI DARI DPPKA // WARNA KUNING METALIK
280	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA RUSH	MUTASI DARI BPKAD KOTA BENGKULU
281	Monitor	Lokal	Sekretariat
282	Monitor	LG / LCD	PENGADAAN CCTV TA 2014. UPTD Ps.Panorama
283	Multi Chanel Analyser	DVR STANDALONE / 16 CHANEL	PENGADAAN CCTV TA 2014. UPTD Ps.Panorama
284	Note Book	lokal	Rusak Berat
285	Note Book	Intel Core 2 Duo	Rusak Berat
286	Note Book	acer / aspire 4741	UPTD Ps.Barukoto
287	Note Book	Acer / Aspire 4741	UPTD Pasar Minggu
288	Note Book	acer / aspire 4741	UPTD Ps.Panorama
289	Note Book	acer / aspire 4741	Keuangan
290	Note Book	dell	Sekretariat (Djuharto. ZR)
291	Note Book	HP / AC002TX	Belanja Modal Pembelian Komputer 2016
292	P.C Unit	-	Internet V-Sat. Ruang Keuangan
293	P.C Unit	ion / pentium 4	Bidang Industri B
294	P.C Unit	samsung / pentium 4	Gudang Barukoto
295	P.C Unit	lokal	Bidang Bina Usaha Perdagangan
296	P.C Unit	ion	Bidang Perlindungan Konsumen
297	P.C Unit	samsung / pentium 4	Rusak Berat
298	Papan DUK	lokal	Sekretariat

299	Papan Nama Instansi	-	Sekretariat - Halaman
300	Papan Pengumuman	lokal	UPTD Ps.Panorama
301	Papan Visuil	lokal	Bidang Bina Usaha Perdagangan
302	Papan Visuil	lokal	Ruang Tamu
303	Perkakas Kantor	lokal / biasa	Rusak Berat
304	Personal Komputer Lain- lain	Lenovo / AIOS200Z/3.JIDCELL	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Personal Komputer
305	Personal Komputer Lain- lain	Western Blue	Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan personal komputer lainnya (hardisk)
306	Pesawat Telephone	panasonic	Rusak Berat
307	Pesawat Telephone	Vero Phone	UPTD Ps.Barukoto
308	Pesawat Telephone	Lokal	Keuangan
309	power Supply	POWER SUPPLY / VIDEO BRAIN	PENGADAAN CCTV TA 2014. UPTD Ps.Panorama
310	power Supply	POWER SUPPLY / VIDEO BRAIN	PENGADAAN CCTV TA 2014.UPTD Ps.Panorama
311	power Supply	POWER SUPPLY / VIDEO BRAIN	PENGADAAN CCTV TA 2014. UPTD Ps.Panorama
312	Printer	lokal	UPTD Ps.Barukoto
313	Printer	epson	UPTD Ps.Barukoto
314	Printer	HP	Ruang Tamu
315	Printer	canon / IP 1700	Bidang Bina Usaha Perdagangan
316	Printer	Canon IP 2770	Keuangan
317	Printer	epson / LX 800	Rusak Berat
318	Printer	epson / LQ2190	Keuangan
319	Printer	HP / D 1000	UPTD Ps.Barukoto
320	Printer	HP / D 1000	Gudang UPTD Ps.Barukoto

321	Printer	canon mp 287	Bidang Perlindungan Konsumen
322	Printer	Canon / iP 2770	Bidang Industri B
323	Printer	Canon / iP 2770	Sekretariat
324	Printer	Canon / iP 2770	Keuangan
325	Printer	CANON / IP 2770 INKJET	Keuangan
326	Printer	CANON / IP 2770 INKJET	PENGADAAN TA 2014
327	Printer	Canon IP 2770	Bidang Pasar
328	Printer	EPSON L120 / EPSON L120	Belanja Modal Pembelian Printer
329	Printer	Canon iP2770	Belanja Modal Peralatan dan mesin Peralatan Kantor Lainnya
330	Printer	Printer Laser, type HP.laser jet Pro M 130 Fn Copy	Belanja MODal pembelian printer
331	Printer	Type HP Laser Jet P.102	Belanja modal Pembelian Printer
332	Printer	Tipe HP laser Jet PRO M 130 FN copy /Scan	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Peralatan Mini Komputer
333	Printer	Canon MA 497	Belanja modal pengadaan printer
334	Printer	-	Pengadaan 4 unit printer merk Canon
335	Rak Besi/Metal	LOKAL / 6 tingkat	Rusak Berat
336	Rak Kayu	lokal	Keuangan
337	Sepeda Motor	Yamaha / L2S	Rusak Berat - Dipegang oleh Sdr. Suharyono
338	Sepeda Motor	Suzuki / TRS	Rusak Berat - Gudang 2
339	Sepeda Motor	Yamaha / L 2 S	Rusak Berat - Gudang 2
340	Sepeda Motor	Yamaha	Rusak Berat
341	Sepeda Motor	Honda / WIN	Dikembalikan ke Dinas Perindag Kota Bengkulu (Rusak Berat - Gudang 2)
342	Sepeda Motor	Sanex	Sekretariat - Dipegang oleh Lihanudin, S.Sos
343	Sepeda Motor	Sanex / Gamma	Rusak Berat - Gudang 2
344	Sepeda Motor	Honda / Supra	

345	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	
346	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	
347	Sepeda Motor	HONDA SUPRA / SUPRA X 125	MUTASI DARI DPPKA
348	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER Z CW	MUTASI DARI DPPKA
349	Sepeda Motor	YAMAHA VEGA RR / MERAH	MUTASI DARI DPPKA .UPTD Ps.Barukoto
350	Sepeda Motor	YAMAHA VEGA RR / MERAH	MUTASI DARI DPPKA. UPTD Pasar Minggu
351	Sepeda Motor	YAMAHA VEGA RR / MERAH	MUTASI DARI DPPKA. UPTD Ps.Panorama
352	Televisi	sharp	Rusak Berat
353	Televisi	Sony	Sekretariat
354	Tool Kit Boks	-	Gudang 1
355	TV Monitor	Panasonic	Belanja MObal Peralatan Dan Mesin - peralatan Kantor Lainnya
356	Video Camera dan Recorder	SONY UNIX UTB / IR SONY COLUOR	PENGADAAN CCTV. UPTD Ps.Panorama
357	White Board	lokal	UPTD Ps.Barukoto
358	White Board	lokal	Ruang Tamu
359	White Board	lokal	Bidang Pasar
360	White Board	lokal	UPTD Ps.Barukoto
361	Wireless	tens	Rusak Berat
362	Wireless	sanken	Bidang Pasar

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu baik menggunakan dana APBD maupun APBN selama 5 tahun terakhir sebagaimana yang telah di jelaskan dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 (Tabel terlampir)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tentu saja tidak mungkin berjalan mulus secara terus menerus, pasti ada hambatan dan kendala yang merintanginya. Namun Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu harus

berupaya menghadapi hambatan tersebut dan akan diatasi dengan segala kemampuan yang ada secara baik dan profesional.

Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (Strength) dan Peluang (Opportunity) yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu untuk kemudian dibandingkan dengan Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat) yang dihadapi. Hal ini diperlukan oleh setiap organisasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul sekaligus mengantisipasi situasi dan kondisi masa depan yang sulit diprediksi, sehingga melalui analisa ini, dapat dihasilkan langkah-langkah dan kebijakan strategis yang akan diambil oleh Perangkat Daerah.

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan proses identifikasi yang menguraikan faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana dan pembiayaan. Analisis lingkungan internal dikelompokkan ke dalam faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) yang digerakkan secara bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun kelemahan-kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, sebagai berikut ;

- a. Terbatasnya sumber dana
- b. Belum mantapnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan antar unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu
- c. Belum adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- d. Rendahnya motivasi masyarakat dalam memelihara peraturan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Sedangkan kekuatan (*Strength*) yang dimiliki Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu adalah ;

- a. Tersedianya SDM Aparatur
 - b. Tersedianya dana untuk melaksanakan program dan kegiatan
 - c. Adanya program dan kegiatan prioritas
 - d. Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan dan kegiatan
 - e. Memiliki prasarana dan sarana yang cukup memadai
 - f. Adanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang jelas.
 - g. Adanya bantuan suntikan dana baik propinsi maupun pusat.
- b. Analisis Lingkungan Eksternal.

Analisis lingkungan Eksternal merupakan proses identifikasi beberapa faktor dari lingkungan luar organisasi yang menguraikan faktor peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*) yang meliputi lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, ekologi dan keamanan. Proses identifikasi akan menghasilkan peluang dan ancaman/ tantangan yang akan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama.

Adapun peluang (*Opportunity*) yang dimiliki Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, sebagai berikut ;

- a. Membaiknya akses transportasi dari daerah dan Kota Bengkulu
- b. Dukungan konkrit dari instansi terkait khususnya dalam penegakan perda menyangkut kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar
- c. Mulai timbulnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar
- d. Penilaian kinerja kebersihan lingkungan perkotaan (Adipura).
- e. Mengembangkan pangsa pasar produk industri yang berdaya saing dan berinovasi dengan mengikuti event-event promosi dalam dan luar daerah. Dan mitvasi terhadap pengerajin dengan memberi penghargaan.

- f. Melakukan pembinaan kepada pengerajin binaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup pelaku usaha binaan.

Selain itu tantangan (*Threat*) yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, sebagai berikut ;

- a. Masih banyak terdapat jenis sampah yang sulit diuraikan oleh proses alam seperti sampah plastik, styrofoam dan logam dilingkungan pasar
- b. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar masih perlu ditingkatkan.
- c. Kesulitan dalam menata pedagang kaki lima dikarenakan pedagang yang kurang menyadari tertib hukum. Ada sebagian pedagang yang berdagang diluar pasar, setelah dilaksanakannya penertibahan, kembali berjualan di badan jalan.
- d. Kurangnya kesadaran pedagang yang membayar retribusi sewa kios, auning dan pelataran yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah memberikan pelayanan dibidang Perdagangan, Perindustrian Kemetrollogian dan Pasar.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu melalui sektor industri, perdagangan dan pasar antara lain sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya Sentra Industri Kota Bengkulu yang merupakan pusat pengembangan IKM dan menjadi IKON IKM Kota Bengkulu ,
2. Pasca pandemik COVID 19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat secara umum,
3. Bidang usaha perdagangan dan perindustrian yang harus beradaptasi mengatasi permasalahan paska pandemi COVID - 19
4. Lemahnya ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi bagi pelaku usahawan,
5. Lemahnya manajemen, pemasaran dan jiwa kewirausahaan
6. Masih minimnya aparatur pembina baik sektor industri, perdagangan dan pasar yang memiliki pengetahuan teknis.
7. Terbatasnya akses pelaku usaha bidang Perdagangan dan Perindustrian kepada sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar,

Pesatnya penyerapan ilmu dan teknologi kekinian oleh pelaku usaha Perdagangan dan Perindustrian cukup mampu meningkatkan daya saing usaha. Hal ini dapat terlihat dari produk-produk usaha lokal yang berinovasi dalam mempromosikan hasil produksinya.

Kedepannya diharapkan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dunia usaha bidang perdagangan dan industri dapat meningkatkan perannya dalam usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan fasilitasi berupa pembinaan,

pengawasan, pelatihan dan fasilitasi akses permodalan yang fleksibel. Untuk mewujudkan hal tersebut semua stakeholder terakait harus berperan aktif menghadapi semua tantangan dimasa akan datang.

Menghadapi hal tersebut diharapkan melalui pembinaan, pendampingan dan pengolahan pasar tradisonal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu akan mampu meningkatkan promosi dan memajukan produk-produk Khas Daerah Kota Bengkulu .

Identifikasi pemasalahan sebagai berikut :

Tabel T-B.35

NO	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya nilai produksi industri kecil dan mikro	Belum optimalnya Pertumbuhan ekonomi	Rendahnya Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Industri Kecil Dan Mikro
			Belum Tersedianya Dokumen Perencanaan Industri(M)
			Kurangnya Orientasi Pasar Terhadap Produk Industri
			Kurangnya pengembanagan produk unggulan daerah
			Kurangnya pengembangan inovasi dan penerapan teknologi pengolahan komoditas lokal
			Belum optimalnya penegmbangan sentra-sentra IKM pendukung wisata
2	Belum terwujudnya iklim perdagangan yang baik	Kurangnya stock dan kelancaran distribusi barang perdagangan	Belum Optimalnya Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat
			Ketidak stabilan harga barang pokok dan barang penting

			Ketidakstabilan Harga Barang Pokok Dan Barang Penting
		Menurunnya omset pedagang kecil dan menengah	Kurangnya jaringan pemasaran produk perdagangan
			Rendahnya kapasitas SDM pedagang kecil dan menengah
			Rendahnya kualitas manajemen usaha perdagangan pasar tradisional dan pasar wisata
			Kurangnya penataan pedagang kaki lima dan asongan

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 merumuskan Sasaran Strategis Pembangunan Industri, berdasar perspektif pemangku kepentingan sasaran tersebut meliputi :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri.
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri.
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
7. Menguatnya struktur industri

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan Tahun 2019-2023 antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan Tahun 2019-2023 antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;
3. Meningkatnya deversifikasi pasar dan produk ekspor;
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (Nation branding);
6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor;
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
8. Meningkatnya pengelolaan perdagangan LN di perbatasan;
9. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang Dalam dan luar negeri;
10. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan;
11. Meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional;
12. Meningkatnya konsumsi rumah tangga nasional terhadap produk dalam negeri dan/atau menurunnya impor barang konsumsi;
13. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang;
14. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah;
15. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
16. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan;
17. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa;
18. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha;
19. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
20. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
21. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih;
22. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal;
23. Terwujudnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi;
24. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian.

Ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dapat dirumuskan factor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian antara lain :

1. Terjalannya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu , Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan,
2. Kebijakan dan strategi operasional kementerian perindustrian dapat mendorong pertumbuhan pengembangan sentra industry potensial di Kota Bengkulu ,
3. Kebijakan dan strategi operasional kementerian perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dengan focus priritas kegiatan untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor untuk meningkatkan penataan system distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, merupakan kebijakan yang berpihak bagi pembangunan bidang perdagangan di Kota Bengkulu ,
4. Program program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bengkulu yang selaras dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu meningkatkan peluang sinergitas pembangunan Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang lebih optimal.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Daerah Kota Bengkulu , antara lain :

1. Keterbatasan koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang terpadu.
2. Sumber daya manusia dan sarana prasarana kemetrolagian didaerah yang belum siap untuk melaksanakan program peningkatan tertib ukur untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri,

3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang : rencana tata ruang wilayah Kota Bengkulu tahun 2019-2023 Kebijakan penataan ruang Kota meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan sistem pusat pelayanan Kota sebagai kesatuan
2. sistem yang terpadu dan berhierarki;

3. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota;
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya;
5. Pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan Kota yang berkelanjutan;
6. Pengelolaan kawasan rawan bencana;
7. Penetapan kawasan strategis Kota dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan,
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dan tujuan RTRW Kota Bengkulu Mewujudkan tata ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana untuk mendukung terwujudnya Kota sebagai kawasan kota wisata dan berpendidikan berskala nasional serta pusat perdagangan dan jasa berskala regional di wilayah Pesisir Barat Wilayah Sumatera.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu ditinjau dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis adalah Penetapan kawasan strategis Kota dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

1. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi . Kabupaten / Kota,

Sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal
2. Meningkatnya kapasitas Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
3. Meningkatnya kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen
2. Tersedianya sumber daya aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bengkulu yang kompeten sesuai dengan jabatan dan bidangnya masing – masing,
3. **Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah,**

Intensitas ruang ditetapkan berdasarkan arahan pola sifat kepadatan lingkungan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekologi dan ekonomi, daya dukung dan daya tampung ruang serta kerawanan terhadap bencana. Pola sifat lingkungan diarahkan sebagai berikut:

- Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi (lingkungan padat)

- Lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang (lingkungan kurang padat)
- Lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah (lingkungan tidak padat)

Lingkungan kepadatan tinggi direncanakan pada Pusat Kota dan perkembangan sepanjang Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan wilayah sekitarnya

Lingkungan kepadatan sedang direncanakan pada wilayah sebagian seluruh Subpusat Kota.

Lingkungan kepadatan rendah direncanakan pada sebagian wilayah Subpusat Kota Betungan sebagai daerah resapan air, kawasan cagar budaya yang dijaga kelestariannya. Selain itu juga dikembangkan pada kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan rawan bencana tsunami. Selanjutnya pola sifat lingkungan ini ditetapkan dalam peta rencana pola sifat lingkungan yang menjadi dasar bagi penetapan intensitas ruang pada setiap pola ruang yang dikembangkan.

Secara umum pengaturan intensitas ruang pada dasarnya ditujukan untuk mengatur suatu lingkungan kota menjadi teratur, aman, sehat, dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Secara lebih khusus, beberapa hal pokok yang ingin dicapai dari rencana pengaturan intensitas penggunaan ruang ini adalah :

1. Untuk menjaga kriteria tata letak bangunan (keserasian dan kekompakan bangunan) agar dapat tercipta lingkungan yang nyaman serta memenuhi faktor estetika lingkungan.
2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama mempertahankan bidang resapan air pada tingkat yang serasi bagi kepentingan pembangunan, sehingga tercipta lingkungan sehat serta terhindar dari genangan air.
3. Mempertahankan dan mengadakan bidang atau ruang terbuka untuk menjaga sirkulasi udara serta kesejukan lingkungan pada tingkat yang optimal.
4. Untuk memenuhi faktor keamanan dan kemudahan, baik berupa keamanan penjarangan bahaya kebakaran, kemudahan penanganan bahaya kebakaran, keamanan jarak pandang untuk transportasi serta kemudahan pergerakan dalam lingkungan.
5. Penjabaran intensitas ruang pada setiap pola sifat lingkungan ditetapkan berdasarkan angka Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar bangunan

(KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Besmen (KTB), Ketinggian Bangunan (KB), dan Jarak Bebas.

Mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu diatas, maka pengembangan wilayah industri dan perdagangan mengalami pergeseran, Karena dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk yang mengubah perkembangan akan kebutuhan wilayah untuk pemukiman, juga perekonomian masyarakat juga berubah mengikuti perkembangan kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi.

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Analisis Lingkungan Internal

a. Sektor Perdagangan dan Pasar

Kota Bengkulu merupakan salah satu pusat perdagangan dan pariwisata propinsi Bengkulu yang didukung dengan 4 UPTD Pasar, yaitu : Pasar Minggu, Pasar Baru Koto, Pasar Panorama dan Pasar Pagar Dewa, kemudian ditambah dengan Pasar Tradisional Modern (PTM), Pasar Rakyat Percontohan Nasioanl serta pusat-pusat perdagangan lainnya apabila dikelola dengan baik oleh orang-orang profesional, maka pengelolaan pasar/pusat perdagangan ini sangat strategis, potensial dan Signifikan dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu .

b. Sektor Metrologi Legal

Metrologi Legal Kota Bengkulu merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Provinsi Kota Bengkulu berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan kewenangan metrologi dari

Provinsi Bengkulu kepada Pemerintahan Kota Bengkulu dilakukan secara locus atau peyerahan wewenang secara utuh, dimana semua sarana prasarana, dokumen dan personil merupakan bagian utuh dari penyerahan P2D. Saat ini,

Metrologi Legal Kota Bengkulu sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan kemetrologian jika dilihat dari persyaratan, peralatan dan personil, tetapi untuk kelayakan sarana dan prasarana yaitu Gedung Kantor, Metrologi Legal belum memenuhi persyaratan maksimal. Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana UPTD Metrologi Legal Kota Bengkulu untuk menjaga akurasi alat standar ukur Metrologi.

UPTD Metrologi Legal Kota Bengkulu juga belum mempunyai kendaraan operasional sebagai pendukung kegiatan tera ulang. Kendaraan operasional sangat diperlukan karena kegiatan metrologi berhubungan dengan alat standar ukur yang berat dan sebagian wilayah kerja yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa..

3. Analisis Lingkungan Eksternal

Era Globalisasi menghadapi adanya kemampuan Adopsi yang tinggi bagi setiap pelaku usaha yang akan berhadapan dengan persaingan Global yang semakin terasa, sejalan dengan berkembangnya berbagai kebijaksanaan ekonomi nasional yang diterapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO- WORLD Trade Organition) serta semakin solidnya kelompok-kelompok kerjasama ekonomi regional seperti AFTA (Asia Free Trade Arangement), NAFTA (Nort Amerika Free Trade Area), ASEAN (Asosation South East Asia Nation) dan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) serta kerjasama ekonomi regional lainnya.

Kota Bengkulu dengan posisi geografis terletak di wilayah pantai Barat Pulau Sumatera berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, memiliki Interland Area di 4 Propinsi tetangga, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi dan Sumatera Barat sehingga merupakan Akses yang tinggi bagi daerah-daerah tersebut. Kota Bengkulu sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Bengkulu mempunyai potensi pariwisata serta jasa , merupakan Aset dan peluang Bisnis yang perlu digarap secara intensif dan terpadu guna memberi peluang bagi Investor untuk berinvestasi di Kota Bengkulu .

4. Nilai - Nilai

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, transpotasi lancar, informasi dan telekomunikasi baik cetak maupun elektronika

semakin berkembang dan canggih tentu saja akan mempengaruhi baik sektor industri, perdagangan dan pasar sehingga akan menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan ditengah-tengah masyarakat Kota Bengkulu

5. Asumsi

Berdasarkan Analisis Lingkungan diatas maka peluang-peluang ini dapat diwujudkan apabila kelemahan dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal ini memerlukan dukungan tenaga sumber daya aparatur yang handal dan profesional, dana mencukupi, serta pelaku usaha industri maupun pedagang yang terampil, berwawasan luas, menjalankan usaha sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

6. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan :

1. Otonomi daerah sebagai kerangka dasar operasional pemerintahan Kota Bengkulu . Oleh karena itu peningkatan kualifikasi kemampuan sumber daya manusia baik dunia usaha/industri dan aparatur sangat diperlukan.
2. Promosi investasi diberbagai sektor merupakan inti (core) akumulasi modal dalam kerangka membentuk akselerasi (percepatan) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pengembangan produksi industri dan perdagangan harus berpedoman kepada kesesuaian mutu serta pengendalian mutu terpadu (PMT) agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat lebih kompetitif.
4. Dunia usaha khususnya di sektor industri dan perdagangan/Pasar perlu diberdayakan tingkat kemandirian dengan melakukan spesialisasi produksi.
5. Dukungan dana yang mencukupi baik rutin maupun pembangunan.

3.4 Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan uraian diatas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu menentukan isu-isu strategis sebagai berikut

1. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD
2. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai,
3. Belum optimalnya perlindungan konsumen
4. Belum optimalnya pertumbuhan Industri

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor perindustrian dan perdagangan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi acuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun mendatang. Dengan pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

Bertitik tolak dengan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dijelaskan dalam table T-C.25 (terlampir),

BAB . V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir.

Strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka lima tahun kedepan dengan melihat faktor eksternal dan internal berdasarkan hasil analisis memiliki strategis dalam proses pembangunan dengan menggunakan metode SWOT.

Kekuatan (*Strength*) :

Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara khusus mendapatkan amanah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. Oleh karena itu, peran dan posisi Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Tersedia sumber daya manusia yang cukup di Kabupaten Kota Bengkulu untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku usaha industri dan perdagangan pun cukup banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif.

Kelemahan (*Weakness*) :

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak kendala yang akan dihadapi oleh Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Perlu digarisbawahi bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.

Kondisi klasik lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan. Aparatur pembina juga terbatas dari sisi kualitas dan kuantitas, pendayagunaan dan kinerja dalam pelayanan publik belum optimal, demikian pula koordinasi antar lembaga belum optimal. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan di Kota Bengkulu.

Selain hal-hal di atas, kondisi geografis yang rentan rawan bencana gempa dan kekeringan, terbatasnya sumber daya air permukaan perlu mendapat perhatian yang serius. Di sisi lain dukungan dana memang masih terbatas karena keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Peluang (*Opportunity*) :

Prospek kemajuan pembangunan bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Bengkulu terbuka lebar karena adanya dukungan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan. Selain itu dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, dan lembaga keuangan lain) juga dapat diakses.

Dari aspek pasar masih terbuka peluang khususnya bagi produk kerajinan. Globalisasi tidak mengenal batas negara dan budaya, sehingga terbuka akses pasar internasional dan kerjasama nasional- internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional. Dukungan dan pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar .

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Bengkulu.

Ancaman (Threat) :

Rendahnya daya saing produk Kota Bengkulu semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk pabrikan. Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas memerlukan penyikapan yang tepat dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah dijelaskan dalam table T-C.26 (terlampir),

BAB VI

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, yaitu :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perdagangan
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Ekspor	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	
Pameran Dagang Lokal	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
Perindustrian	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Adapun rencana, Kegiatan dan pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dijelaskan dalam Tabel T-C.27 (Tabel Terlampir)

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu memiliki tugas penyelenggara urusan bidang Perdagangan dan Perindustrian guna mencapai Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPD Kota Bengkulu, hal dapat dilihat dalam tabel TC-28 (Terlampir)

7.2 Indikator Program

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian membidangi urusan Perdagangan, Perindustrian, Kemetrolagian dan Pasar. Dalam mencapai urusan kinerja program dengan indikator yang akan dicapai dalam 3 Tahun Dilaknakannya bidang urusan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu adalah merupakan dokumen perencanaan, berisi asumsi-asumsi tentang rencana capaian (target), sasaran kegiatan dalam rangka mencapai target tersebut yang menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja Tahunan). Oleh karena itu semua pejabat dan staf harus memahami Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kurun waktu tahun 2024-2026 muncul permasalahan baru yang belum diantisipasi dalam Renstra ini, sehingga terdapat kegiatan baru yang ditugaskan oleh Walikota kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu. Apabila hal tersebut terjadi, maka kegiatan dimaksud perlu diupayakan agar terkait dengan pencapaian sasaran yang direncanakan. Mengingat bahwa RPJM Kota Bengkulu tahun 2024-2029 yang ada pada saat ini disesuaikan dengan masa jabatan Walikota Bengkulu.

Perlu disadari bahwa permasalahan sangat kompleks bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu adalah permasalahan pasar, yang tentu tidak akan mampu diselesaikan secara sendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja, terutama UPTD Pasar perlu diwujudkan. Hal itu sudah harus dilakukan sejak penyusunan rencana kegiatan kurun waktu tahun 2024-2029 dan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan setiap tahunnya. Penggalangan komitmen dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait termasuk Kabupaten/Kota/propinsi serta masyarakat dan dunia usaha baik kecil maupun menengah. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak Bapelitbang Kota Bengkulu perlu ditingkatkan agar rencana kegiatan yang disusun dapat dipahami dan diakomodir dengan baik.

Untuk mencapai target sasaran yang direncanakan dalam Renstra diperlukan komitmen tanggung jawab yang tinggi dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya secara keseluruhan dalam pencapaian target kinerja kegiatan

yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian maka prestasi kerja dari seluruh pejabat termasuk staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu hendaknya dapat dinilai secara rasional dan obyektif. Sehubungan dengan itu seluruh pimpinan unit kerja harus berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja pejabat dan staf pada unit kerja yang dipimpinnya serta memberikan Reward bagi yang berprestasi.

Perencanaan yang integratif dan komprehensif, monitoring dan evaluasi secara obyektif dan akurat dapat dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana/ prasarana dan biaya yang memadai, sehingga dapat mewujudkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu sebagai satuan kerja daerah yang mampu melaksanakan tugas pemerintahan Kota Bengkulu, terutama mengelola kegiatan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Demikian semoga Renstra yang telah tersusun ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Bengkulu, 10 Februari 2023
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bengkulu



Drs. BUJANG HR, MM
NIP. 196606081994031008

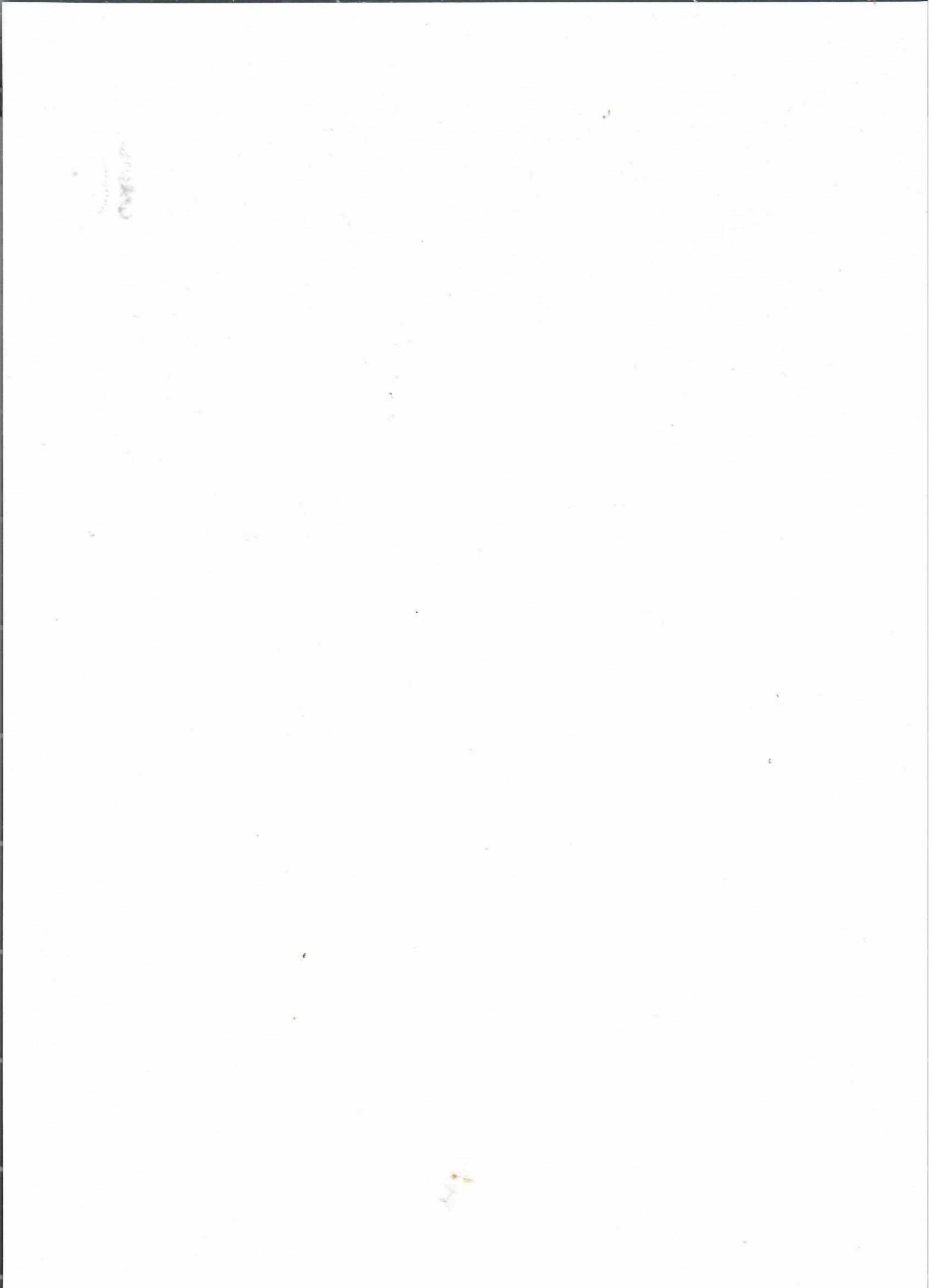
Tabel 1 C-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Binas Perdagangan dan Industri
Kota Bengkulu

[illegible][illegible]

3023
Jongkikh,
English (Literary) Department
Kanto Jongkikh
Date: 20/05/2023
Time: 14:55:00
1027 1455500011020011000

[illegible]

Tanggal: _____
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Pangreh
 2022



Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		1. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD	32	40	45
		Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan	2. Nilai rupiah sektor perdagangan	1,8 M	2,5M	2,7M
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		1. Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PAD	6.6	6.65	7
		Meningkatnya pertumbuhan industri	2. Pertumbuhan IKM/UKM	85	87	92
			3. Pertumbuhan Industri Kreatif	2.8	3	3.5

Bengkulu, 10 februari 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Bengkulu



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		1. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif	Optimisasi potensi bidang usaha perdagangan
				Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Perdagangan
				Peningkatan Promosi Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Revitalisasi pasar tradisional
				Peningkatan Kerjasama Pertumbuhan Usaha Eksport
				Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		2. Meningkatkan pertumbuhan industri	Meningkatkan pertumbuhan industri	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri
				Peningkatan pembinaan, promosi dan optimalisasi kawasan sentra-sentra produk lokal.
				Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi
				Pengelolaan Kawasan Industri
				Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bengkulu



Drs. BUJANG HR, MM

NIP. 196606081994031008

Tahun	Semester	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Berkas Program Berkas Kegiatan (Output)	Lokasi	Tahun 2024				Tahun 2025				Unit Kerja Pembina/Manajemen Peningkat/Target		
						Target	Indikator dan target Indikator (Rp)	metode data	Target	Rp	Target	Rp				
2023	G1	3.10.01.201.02	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
2024	G1	3.10.01.201.03	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
2025	G1	3.10.01.201.04	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
2026	G1	3.10.01.201.05	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
2027	G1	3.10.01.201.06	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
2028	G1	3.10.01.201.07	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
2029	G1	3.10.01.201.08	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
2030	G1	3.10.01.201.09	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
2031	G1	3.10.01.201.10	Penerapan Program Nasional	Jumlah Penerimaan Penerimaan Nasional Penerimaan Lokal Penerimaan Daerah Penerimaan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33
						5	299.000.000	APBD	11	333.333.333	0,33	333.333.333	0,33	11	333.333.333	0,33

Tajuk	Bab	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Secara Program (berdasarkan Output)	Lokasi	Target Program dan Kinerja Pendidikan										Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Penyelenggaraan	Unit Kerja Penyelenggara Daerah Pendidikan
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Target	Rp		
						Target	Indikator terkait (Rp)	Target	Indikator terkait (Rp)	Target	Indikator terkait (Rp)						
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)			
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Bengkulu	2 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	100,000,000			
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Larena dan Pemasaran Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Larena dan Pemasaran Industri	Kota Bengkulu	2 dokumen	40,700,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	50,000,000			
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Industri dan Pemasaran Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Industri dan Pemasaran Industri	Kota Bengkulu	1 dokumen	125,000,000	2 dokumen	125,000,000	2 dokumen	125,000,000	2 dokumen	125,000,000	125,000,000			
		3.31.02.2.01.06	Penelitian terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Bengkulu	2 dokumen	52,400,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	50,000,000			

Tabel T-C.28 {7.1}

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA PEMRANTUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN (%)			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
		%	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Bidang Perdagangan					
1.1	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD	30,67	32	40	45	72
1.2	Nilai rupiah sektor perdagangan	1,3M	1,8 M	2,5M	2,7M	2,7 M
1.3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	30	35,97	45,2	53	53
1.4	Persentase Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat		38,2	38,2	40	40
1.5	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Bahan Pokok Antar Waktu)	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
1.6	Nilai Ekspor	NA	0,5	0,7	1	1
1.7	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Utp) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	75	29	33	37	37
1.8	Cakupan Promosi Penggunaan Dan Pemasaran Dalam Negeri	0	2	2,25	2,5	2,5
2	Bidang Industri					
2.1	9. Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PAD	6,585	6.6	6.65	7	7
2.2	10. Pertumbuhan IKM/UKM	85	85	87	92	92
2.3	11. Pertumbuhan Industri Kreatif	NA	2.8	3	3.5	3,5
2.4	12. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	35	35	37	40	50
2.5	13. Capaian Jaringan Kota Kreatif	NA	10	15	20	20

